

Unimus Raih Dana Penelitian Tertinggi

SEMARANG (KR) - Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dalam kurun 2 tahun terakhir meraih prestasi sangat bagus di bidang penelitian. Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unimus yang termasuk Kluster Utama ini, secara nasional menduduki peringkat 9 perolehan hibah penelitian terbesar dana Dikti.

Tahun 2021 juga mendapat dana penelitian dari Dirjen Dikti Rp 1,3 M. Total tahun 2021 Unimus meraih dana 4,2 m untuk semua jenis penelitian. Serta 1 judul pengabdian masyarakat Rp 40 juta. Khusus pengabdian memang sedikit karena secara nasional dana pengabdian menurun sangat signifikan.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unimus Prof Dr Purnomo dan Rektor Unimus Prof Dr Masruki MPd kepada pers di Semarang, Selasa (5/7) menyampaikan tahun 2022 ini Unimus mendapat dana total dari Dikti Rp 4,8 M dengan rincian 25 judul penelitian akademik dan vokasi.

"Capaian ini sebagai peringkat pertama peraih hibah penelitian tertinggi se-LLDikti Jateng. Total Rp 4,8 M terdiri Rp 4,2 M dari dana DRPM Dikti dan dana Kedaireka Matching Fund (MG) langsung dari Dirjen Dikti atas nama dosen Unimus Dr Stalis Norma Etika sebesar Rp 600 juta. Unimus masih berharap dapat lagi MF karena saat ini program MF masih berprosesor seleksi proposal untuk tahap berikutnya," ujar Prof Purnomo.

Menurutnya, dengan capaian bagus ini menempatkan Unimus sebagai PTS level atas peraih dana dana penelitian melebihi PTS-PTS besar yang selama ini mendominasi raihan dana penelitian di LLDikti Jateng. Ke depan, dengan capaian ini akan menambah semangat untuk terus berkarya di bidang penelitian. Untuk itu LP2M menggandeng badan pengembangan SDM Unimus dibawah pimpinan Dr Ernawati untuk meningkatkan kompetensi SDM para dosen di Unimus. (Sgi)

Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial

MAGELANG (KR) - Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto menyampaikan, sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 secara tegas telah mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, sehingga peran perpustakaan sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Selaras dengan semangat tersebut, penguatan mentalitas budaya harus sejalan dengan agenda revolusi mental dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya membaca, termasuk berlaku untuk masyarakat disabilitas serta masyarakat yang berada di daerah terpencil. Adi menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar guna menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat.

"Kegiatan transformasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program revolusi mental yang digantikan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo," kata, Adi saat acara stakeholder meeting program transformasi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2022 di Gedung Graha Seba Pustaka Perpustakaan Muntian, Rabu (6/7).

Sementara langkah kebijakan strategis yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya mensukseskan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di antaranya, dari sisi regulasi Pemerintah Kabupaten Magelang telah memajukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam RPJMD hasil revisi periode 2020-2024.

Dari sisi anggaran, dengan segala keterbatasan APBD ditambah lagi pada situasi Pandemi, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap memberikan dukungan anggaran bidang perpustakaan yang terus meningkat khususnya pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, bahkan untuk Tahun 2022 ini mencapai Rp. 1.063.616.000. (Bag)

DESA WISATA SEMBUNGAN WONOSOBO

Raih ADWI 2022, Lapangan Kerja Terbuka

WONOSOBO (KR) - Daya tarik wisata Puncak Sikunir dengan keindahan pemandangan matahari terbit. Juga perpaduan destinasi wisata alam Telaga Cebong dan wisata budaya Potong Rambut Gimal dan lainnya menjadi daya tarik wisata yang fantastis. Berlokasi di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo masyarakat banyak mendapatkan lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Apalagi Desa Sembungan masuk dalam 50 Desa Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

"Meningkatkan potensi wisata Desa Sembungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI berkolaborasi dengan Astra yang telah menjadikan Tunas Kampung Berseri Astra. Sebagai mitra kita untuk membangkitkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya," tegas Menteri Parekraf/Badan Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dalam rilis ke KR, Rabu (6/7).

Sandiaga telah bertandang lang-

sung ke Desa Sembungan, Minggu (4/7) pagi dengan didampingi Wakil Bupati Wonosobo Drs M Albar. Merupakan desa tertinggi di pulau Jawa di ketinggian sekitar 2.300 Mdpl. Lokasi Desa Sembungan mudah dijangkau dari arah Wonosobo sejauh 24 kilometer atau dapat ditempuh dengan waktu 55 menit.

Sandi menyebutkan kenaikan kunjungan wisata di tanah air di tengah pandemi berkisar 30 persen berdasarkan big data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. "Menjadikan momentum kebangkitan kita. Di tengah-tengah pandemi justru desa wisata menjadi pilihan," terang Sandi.

Kememparekraf berkomitmen untuk memasukan desa wisata sebagai program unggulan. Demokratisasi pariwisata adalah memberikan dampak pariwisata berkeadilan. "Karena desa wisata ini yang merasakan seluruh masyarakat langsung. Kunjungan setiap tahun di Desa Wisata Sembungan 250 ribu itu langsung berdampak kepada masyarakat di sini," jelas Sandi.

Selain potensi wisata alam, seni, budaya yang luar biasa di desa ini telah memenuhi standar penilaian tim juri ADWI 2022 dari tujuh kategori. "Yaitu daya tarik pengunjung (alam dan buatan, seni dan budaya),

suvenir (kuliner, fesyen, dan kriya), homestay, toilet umum, digital dan kreatif, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE), dan Kelembagaan Desa," terang Sandi. (Vin)



Menteri Parekraf Sandiaga Uno ikut dalam prosesi pemotongan rambut gimal saat kunjungan di Desa Wisata Sembungan Wonosobo dengan alam yang indah.

Pedagang Pasar Raya Salatiga Keberatan Harga Sewa Kios

SALATIGA (KR) - Ratusan pedagang Pasar Raya I dan Pasar Raya 2, Salatiga mendatangi DPRD Salatiga, Rabu (6/7). Mereka merasa keberatan dengan harga sewa kios yang harus dibayar pada Agustus 2022 mendatang.

Kedatangan mereka diterima Komisi B dan DPRD mengundang Dinas Perdagangan yang dipimpin Kusumo Aji, sedangkan para pedagang diwakili oleh pengurus paguyuban pedagang dan beberapa pedagang.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Raya II Salatiga, Eko Hari Triyono mengatakan, pedagang memohon kepada Dinas Perdagangan Salatiga untuk meringankan harga sewa dan jangka waktu pembayaran agar dikaji ulang. "Kami memohon harga sewa dan jangka waktu dikaji ulang, karena efek pandemi Covid 19 sangat

terasa bagi para pedagang, terutama pedagang kecil. Banyak pedagang yang gulung tikar dan kami kini mulai merangkak. Mohon dikaji ulang," kata Eko Hari Triyono di DPRD Salatiga, Rabu (6/7). Para pedagang berharap, Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, bisa merespons permohonan para pedagang. Pedagang berharap Pj Walikota sidak ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi pasar yang sebenarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Kusumo Aji menjelaskan, pasca berakhirnya kerja sama antara Pemkot Salatiga dan PT

Matahari Mas Sejahtera (MAS), semua aset Pasar Raya I dan Pasaraya II menjadi milik Pemkot Salatiga terhitung sejak Juni 2021. "Pemkot Salatiga memberikan kebijakan, bagi eks pedagang yang ingin melanjutkan usaha di Pasar Raya 1 dan 2 dengan sistem sewa. Untuk yang sewa ruko sudah dilakukan, sekarang yang menempati kios. Sewa per tahun dan nilai sewa ditentukan tim appraisal," kata Kusumo Aji.

Dikatakan, Dinas Perdagangan sudah sosialisasi harga sewa kios kepada pedagang eks pedagang Pasar Raya I dan 2 yang ingin melanjutkan usahanya. Kusumo Aji mengungkapkan, sebenarnya harga sewa wajar, per tahunnya Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. Dinas hanya melaksanakan kebijakan yaitu Peraturan Walikota (Perwali).

Ketua Komisi B DPRD Salatiga, M Miftah mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari para pedagang Pasar Raya I dan 2 terkait harga sewa kios. Kebijakan Pemkot Salatiga terkait sewa ini kios ini menurutnya, menindaklanjuti temuan BPK, pemeriksaan tahun 2021, ada temuan sekitar 525 kios di Pasar Raya 1 dan 2, tidak dipungut sewa. "Nilainya dalam setahun kurang lebih Rp 108 miliar," jelas Miftah.

Karena ada temuan tersebut, maka Dinas Perdagangan baru menindaklanjutinya dengan Perda Nomor 29 tahun 2019 dan Perda Nomor 32 Tahun 2019 tentang retribusi dan sewa. "Mulai Juni 2021 sudah berakhir dan kembali ke Pemkot Salatiga, lha mestinya Juni sampai Desember 2021 harus ada sewanya. Ini yang jadi temuan BPK," katanya. (Sus)

Sejumlah Hasil Pembangunan Belum Optimal

TEMANGGUNG (KR)

- Bupati Temanggung Al Khadziq mengakui adanya hasil pekerjaan pembangunan di tahun 2021 yang kualitasnya tidak optimal, sebagaimana temuan dari DPRD. "Terdapat beberapa pelaksanaan program pembangunan pada 2021 yang kualitasnya belum optimal, sehingga ini menjadi perhatian kita semua," kata Bupati Temanggung Al Khadziq, Kamis (7/7).

Hal itu disampaikan Al Khadziq pada gelar pengawasan daerah Kabupaten Temanggung bertajuk "Temanggung Tentrem



Bupati Temanggung menyerahkan penghargaan kepada sejumlah OPD atas prestasi yang diraih.

Marem Gandem' dengan melakukan peninjauan keberberapa titik pembangunan dan menemukan

hasil tidak optimal, yang jadi rekomendasi DPRD di sidang paripurna. Temuan itu antara lain di Puskesmas Kedu dan Bulu.

Atas temuan DPRD tersebut, Al Khadziq mengingatkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan organisasi Perangkat daerah (OPD) agar pada semua kegiatan pembangunan jangan hanya asal mau serah terima di akhir pekerjaan.

"Mohon pada PPK dan OPD sebelum serah terima betul-betul diperiksa item per item pekerjaannya," katanya. Kalau memang belum sesuai spesi-

fikasi, kata dia, jangan dibayarkan retensinya dahulu sampai penyedia menyelesaikan pekerjaannya sebaik-baiknya.

Al Khadziq meminta pada inspektur untuk mendampingi tiap pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai menjelang serah terima pekerjajaan.

Ditambahkan, mungkin tidak ada niat untuk menurunkan kualitas pembangunan tetapi kadang hanya karena cepat selesai, karena tidak tahu detail-detail teknis sebuah pekerjaan sehingga terlewatkan. (Osy)

Ganjar Pranowo Bertemu Sri Paduka Mangkunegara X

SEMARANG (KR) - Sri Paduka Mangkunegara X, KGPA Bhre Cakarahutomo Wira Sudjiwo, menemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinas Gubernur di Semarang. Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan Pura Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa.

Hal tersebut disampaikan Kanjeng Gusti Bhre usai bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kamis (7/7). Menurut Gus-

ti Bhre, Kraton Mangkunegara sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, punya amanah besar untuk menggali kebudayaan, melestarikan kebudayaan, dan juga mengembangkannya.

Bhre menjelaskan pengembangan Pura Mangkunegaran harus relevan dengan perkembangan zaman sekarang.

Meski demikian dalam pengembangannya akan selalu berdasarkan pada nilai-nilai dan akar dari Mangkunegaran yang su-

dah ada selama ini. Baik dari segi kebudayaan, pariwisata, dan pengetahuan.

"Tapi yang paling penting adalah tidak melupakan fondasi atau akarnya sendiri, yaitu paugerannya, adatnya, dan tradisinya. Nilai-nilai yang ada di Pura Mangkunegaran menjadi fondasi kita seterusnya dan selamanya, juga untuk pengembangan kami," tutur Gusti Bhre.

Bhre mengungkapkan mendapat dukungan dari Ganjar Pranowo dan Pemprov Jawa Tengah dalam upaya pengembangan Pura Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa.

Ia menyebut dukungan Ganjar sangat luar biasa untuk Pura Mangkunegaran. Diharapkan ke depan Pura Mangkunegaran dan Pemprov Jateng dapat bersinergi dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

"Saya senang sekali. Ini suatu kehormatan juga bagi kami untuk bisa bertemu dengan Bapak Gubernur. Kami sangat senang dan bersyukur juga atas

support dari beliau yang sangat luar biasa. Kepercayaan dan support beliau kepada kami agar bisa terus berkembang dan tentu harapan ke depan Pura Mangkunegaran bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam kegiatan kebudayaan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bhre juga menyampaikan beberapa kegiatan terdekat yang diselenggarakan oleh Pura Mangkunegaran.

Di antaranya adalah Kirab Pusaka Malam 1 Suro yang sempat terhenti selama pandemi Covid-19 dan hanya dilakukan secara terbatas.

Lalu ada misi kebudayaan yang dilakukan oleh para penari Mangkunegaran untuk road show ke tiga negara.

Ganjar Pranowo mengatakan keinginan KGPPA Mangkunegaran X Bhre Cakarahutomo untuk merevitalisasi kraton atau Pura Mangkunegaran sesuai dengan apa yang diinginkan. (Bdi)



Sri Paduka Mangkunegara X, KGPA Bhre Cakarahutomo Wira Sudjiwo saat bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Mimbar Legislatif

DPRD Terima Aspirasi Warga Batang Terdampak PLTU

WARGA terdampak pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, mengadu ke DPRD Jateng karena merasa tidak puas dengan kebijakan ganti rugi pembebasan tanah dan proses perekrutan tenaga kerja. Mereka minta perlindungan hukum kepada wakil rakyat di DPRD Jateng.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono di Semarang, Kamis (7/7). Warga Batang yang mendatangi gedung DPRD Jateng pekan lalu, diterima oleh Ferry dari Fraksi Golkar dan Abang Baginda Muhammad dari FPDI. Dewan mengapresiasi langkah warga dari beberapa desa yang terdampak pembangunan dan pembebasan lahan. Langkah tersebut sudah sesuai prosedur. Langkah warga Batang mengadu ke Dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka dinilai tepat. Dewan akan maksimal membantu warga Batang untuk mendapatkan hak mereka.

Dengan adanya pengaduan tersebut, Dewan akan memfasilitasi proses mediasi dengan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dengan didampingi Biro Hukum



Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono

Pemprov Jawa Tengah untuk menemukan solusi terbaik bagi warga dan BPI. DPRD Jateng minta kepada Biro Hukum Pemprov Jateng selaku mediator kasus ini, untuk terus mengawal dan selalu memberikan laporan terkait proses mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak. Dewan berharap proses mediasi bisa berlangsung dengan baik dan aman. Dewan minta kepada Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah agar memberikan laporan ke DPRD Jateng terhadap perkembangan kasus tersebut. Karena jika mediasi tetap tidak menemukan titik temu, maka Dewan bisa memberikan kebijakan lebih lanjut. Dewan akan terus mengikuti dan mengawal proses mediasi kasus ini. Dewan juga akan melakukan peninjauan lapangan untuk memperdalam informasi. Untuk itu Dewan berharap melalui mediasi nantinya sudah ada titik temu apa yang menjadi tuntutan para warga terhadap PT BPI. (*)

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)